



Pengembangan Model Pemberdayaan Jemaat Partisipatif di Wilayah Lingkar Tambang Halmahera

Development of a Participatory Congregation Empowerment Model in the Halmahera Mining Circle Area

Sirayandris J. Botara

Program Pascasarjana Teologi, Universitas Halmahera, Tobelo, 97762, Indonesia

E-mail: sirayandrisbotara@uniera.ac.id

Abstrak

Kata Kunci:

*pemberdayaan jemaat; eklesiologi
partisipatif; wilayah lingkar
tambang; ketahanan sosial-ekologis;
gereja dan pembangunan komunitas*

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan jemaat partisipatif bagi jemaat di Kawasan sekitar tambang Halmahera yang mengalami tekanan sosial-ekologis akibat ekspansi industri ekstraktif. Program dilaksanakan pada November 2025 dengan melibatkan 38 peserta yang mewakili unsur majelis dan anggota jemaat. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif-kontekstual melalui Focus Group Discussion (FGD), refleksi eklesiologis, lokakarya penguatan kapasitas, serta evaluasi pre-post berbasis kuesioner persepsi. Tiga dimensi utama, kesadaran sosial-ekologis, pemahaman tentang peran gereja sebagai pemberdayaan, dan komitmen terhadap inisiatif kolektif, meningkat sebagai hasil dari evaluasi pre-post deskriptif. Salah satu hasil langsung dari kegiatan ini adalah pembentukan kelompok kerja dan forum diskusi internal jemaat sebagai struktur awal untuk upaya kolektif yang berkelanjutan. Artikel ini menyajikan model empat tahap pemberdayaan jemaat: identifikasi sosial-ekologis, refleksi teologis kontekstual, penguatan kapasitas, dan aksi kolektif, dengan bersifat siklik dan replikatif untuk komunitas yang terpengaruh oleh ekonomi ekstraktif di Indonesia.

Abstract

Keywords:

*congregational empowerment;
participatory ecclesiology; mining
areas; socio-ecological resilience;
church and community development*

This community service program aims to develop a participatory congregational empowerment model for congregations in the Halmahera mining area experiencing socio-ecological pressures due to the expansion of extractive industries. The program was implemented in November 2025 with 38 participants representing congregation members and councils. The approach used was participatory-contextual through Focus Group Discussions (FGDs), ecclesiological reflection, capacity-building workshops, and pre-post evaluations based on perception questionnaires. Three main dimensions, socio-ecological awareness, understanding of the church's role as an empowerer, and commitment to collective initiatives, increased as a result of the descriptive pre-post evaluation. One direct outcome of this activity was the formation of working groups and internal congregational discussion forums as initial structures for ongoing collective efforts. This article presents a four-stage model of congregational empowerment: socio-ecological identification, contextual theological reflection, capacity building, and collective action, with a cyclical and replicable nature for communities affected by the extractive economy in Indonesia.

e-ISSN: 2798-3684 | Copyright © 2026 Author(s)

License:  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Article info:Received: 10 Maret 2026 | Accepted: 09 April 2026 | Online: 07 Mei 2026

How to cite this article: J. Botara, S. (2025). Pengembangan Model Pemberdayaan Jemaat Partisipatif di Wilayah Lingkaran Tambang Halmahera: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 90-102. <https://doi.org/10.51135/baktivol6iss1pp90-102>

1. Pendahuluan

Perekonomian Provinsi Maluku Utara menunjukkan dinamika kuat yang didorong oleh ekspansi industri pertambangan nikel dan hilirisasi mineral dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai 20,49 % pada tahun 2023, dengan sektor pertambangan dan penggalian sebagai kontributor tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi regional (*y-on-y*) dibandingkan lapangan usaha lainnya seperti pertanian atau perdagangan.[1] Pada Triwulan III-2025, perekonomian Maluku Utara juga tumbuh signifikan sebesar 39,10 % *y-on-y*, lagi-lagi didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian.[2] Selain itu, nilai ekspor provinsi ini terus meningkat, termasuk komoditas golongan nikel yang secara historis menjadi andalan ekspor.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini dibarengi dengan tantangan kesejahteraan dan ketimpangan struktural. Rasio gini pada September 2024 menunjukkan adanya ketimpangan yang masih moderat di provinsi ini dengan nilai 0,296, yang mencerminkan disparitas dalam distribusi pendapatan masyarakat.[3] Dominasi ekonomi oleh sektor ekstraktif seperti pertambangan sudah menghasilkan peningkatan signifikan dalam PDRB, namun belum otomatis meningkatkan kesejahteraan secara merata di seluruh komunitas lokal.

Kawasan sekitar tambang di pulau Halmahera, termasuk Kabupaten Halmahera Tengah merupakan pusat industri nikel dan smelter, masyarakat setempat mengalami dampak sosial-ekologis yang signifikan. Studi dan laporan independen menunjukkan bahwa intensifikasi aktivitas pertambangan sering kali berkorelasi dengan degradasi sumber daya alam, termasuk kualitas air sungai dan pesisir, tekanan terhadap nelayan dan petani lokal, serta perubahan dalam struktur mata pencaharian yang mendorong ketergantungan pada pekerjaan industri kontrak.[4][5]

Tekanan sosial-ekologis ini tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi keluarga, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial bergereja. Ketika akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih menjadi terbatas, biaya hidup meningkat, dan persaingan kerja semakin ketat, pola hubungan keluarga dan berjemaat mengalami perubahan, memicu konflik sosial dan respons pastoral yang kompleks dalam kehidupan persekutuan gerejawi. Situasi ini menciptakan dilema bagi jemaat, karena sebagian anggota meraih keuntungan ekonomi dari industri, sementara yang lain mengalami kerugian akibat tergesernya mata pencaharian agraris-maritim yang telah menjadi sumber kehidupan keluarga secara turun-temurun.

Dalam konteks ini, peran gereja sebagai komunitas iman dapat diperluas dari definisi persekutuan orang-orang percaya menjadi persekutuan pemberdayaan sosial yang responsif terhadap tantangan lokal. Pendekatan eklesiologi partisipatif ini menempatkan jemaat sebagai subjek aktif dalam menganalisis realitas sosial, merumuskan refleksi teologis yang kontekstual, dan mengembangkan solusi kolektif yang berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi dasar bagi kegiatan pengabdian masyarakat yang dijelaskan dalam artikel ini, dengan tujuan mengembangkan model pemberdayaan jemaat partisipatif di kawasan lingkaran tambang Halmahera sebagai kontribusi praktis terhadap transformasi sosial dan spiritual komunitas Gereja.

2. Pelaksanaan dan Metode

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan khusus di jemaat GMIH Lokulamo Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, yang berada dalam kawasan pertambangan nikel dan secara sosial-ekologis terdampak langsung aktivitas industri ekstraktif.

Oleh karena itu, pemilihan lokasi ini didasarkan pada tiga alasan (1) jemaat GMIH Lokulamo mengalami tekanan sosial yang ditandai dengan meningkatnya biaya hidup dan perubahan mata pencaharian; (2) jemaat GMIH Lokulamo sebagai gereja lokal berfungsi sebagai tempat pertemuan yang dapat diakses oleh semua warga jemaat, dan (3) jemaat GMIH Lokulamo menunjukkan bahwa adanya agenda penting untuk meningkatkan kapasitas kolektif di tengah tantangan polarisasi antara kepentingan ekonomi dan persoalan ekologis. Pemilihan lokasi berbasis komunitas ini selaras dengan pendekatan *community-based engagement* yang menekankan pentingnya ruang sosial lokal dalam membangun partisipasi kolektif dan kepercayaan publik,[6] serta *rural community resilience*. [7]

Kegiatan dilaksanakan pada bulan November 2025 melalui empat sesi bertahap dan berkelanjutan. Peserta berjumlah 38 orang yang dipilih secara purposif dengan kriteria: (a) merupakan anggota aktif jemaat, (b) mewakili unsur pelayanan dan kategori warga jemaat, (c) berdomisili di wilayah yang terdampak langsung atau tidak langsung oleh aktivitas pertambangan, dan (d) bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Komposisi peserta mencakup unsur majelis jemaat, yaitu pendeta, penatua, dan diaken, serta perwakilan warga jemaat dari kategori pemuda, kaum wanita, kaum bapak, dan pekerja industri tambang. Pelibatan peserta lintas kategori ini dimaksudkan untuk memastikan keterwakilan kelompok yang mengalami manfaat ekonomi maupun tekanan sosial-ekologis, sehingga proses identifikasi masalah, refleksi, dan perumusan aksi kolektif dapat dilakukan secara partisipatif dan inklusif.[8]

2.2 Metode Kegiatan

Metode pengabdian ini mengimplementasikan pendekatan partisipatif-kontekstual, yang menjadikan jemaat sebagai subjek aktif dalam proses identifikasi masalah, refleksi bersama, serta perumusan solusi kolektif. Pendekatan partisipatif dipilih karena dalam konteks wilayah ekonomi ekstraktif, intervensi sosial yang bersifat *top-down* cenderung kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Bahwa pengelolaan dan respons komunitas di daerah ekstraktif memerlukan partisipasi aktor lokal untuk memperkuat kapasitas adaptif terhadap dinamika ekonomi global.[10] Oleh karena itu, pemberdayaan jemaat difokuskan pada penguatan kapasitas internal dan solidaritas komunitas. Sebab itu, pendekatan ini selaras dengan ketahanan komunitas dan kapasitas adaptif wilayah ekstraktif.[6] Dalam konteks komunitas lingkaran pertambangan, partisipasi aktif adalah esensial untuk mengurangi polarisasi sosial dan membangun komitmen kolektif.

2.2.1 Penyadaran dan Peningkatan Pemahaman

Langkah awal dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan pemetaan sosial untuk mengidentifikasi isu-isu krisis ekologis, ketergantungan ekonomi, serta fragmentasi internal komunitas. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kesadaran kritis (*critical consciousness*) yang menekankan pentingnya refleksi kolektif terhadap struktur sosial yang memengaruhi kehidupan komunitas.[10] Proses dialog memungkinkan peserta untuk menghubungkan pengalaman pribadi dengan dinamika struktural kawasan industri, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif tentang tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi.

2.2.2 Pendidikan Berkelanjutan

Metode pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) dilaksanakan melalui lokakarya reflektif yang mengintegrasikan diskusi teologis dan analisis sosial. Pendekatan ini relevan dalam rangka perubahan perspektif yang terjadi melalui proses pembelajaran dialogis dan reflektif.[11] Dalam kegiatan ini, jemaat diajak untuk menganalisis realitas ekonomi ekstraktif melalui perspektif iman dan tanggung jawab sosial gereja, sehingga terjadi pergeseran paradigma dari orientasi seremonial ke orientasi partisipatif-transformatif.

2.2.3 Pendampingan dan Mediasi Komunitas

Tahap pendampingan dan mediasi dilakukan untuk mengurangi polarisasi internal jemaat antara kelompok yang bekerja di industri dan kelompok yang terdampak secara ekologis. Deneulin dan Montevecchio menegaskan bahwa mediasi komunitas dalam lingkungan yang terpolarisasi dapat meningkatkan kohesi sosial dan memperkuat kepercayaan antar kelompok.[12] Dalam konteks ini, gereja berfungsi sebagai arena dialog yang aman dan inklusif, sehingga konflik kepentingan dapat dikelola melalui komunikasi transparan dan komitmen kolektif.

Secara keseluruhan, kombinasi metode penyadaran, pendidikan berkelanjutan, pelatihan kapasitas, dan pendampingan komunitas menghasilkan pendekatan pemberdayaan yang holistik. Oleh karena itu, ini tidak hanya mendorong kesadaran individu, tetapi juga memperkuat modal sosial komunitas sebagai dasar untuk aksi kolektif yang berkelanjutan dalam kawasan sekitar tambang.

2.3 Evaluasi dan Indikator Dampak

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan pendekatan penilaian *pre-post* yang menekankan pada persepsi dan komitmen tindakan, yang umum digunakan dalam intervensi berbasis komunitas untuk mengukur perubahan kesadaran dan orientasi kolektif. Kuesioner disusun dalam tiga dimensi utama, yaitu: (1) kesadaran sosial-ekologis, (2) pemahaman peran gereja dalam pemberdayaan, dan (3) komitmen Tindakan kolektif. Masing-masing dimensi diukur dengan empat butir pernyataan, sehingga terdapat total terdapat 12 butir. Pendekatan ini konsisten, terutama ketika tujuan program adalah transformasi paradigma dan penguatan kapasitas sosial, bukan evaluasi dampak ekonomi jangka panjang. Studi tentang adaptive capacity menunjukkan bahwa pengetahuan lokal dan kesiapan kolektif penting dalam merespons perubahan sumber daya.[13]

Pelaksanaan evaluasi *pre-post* menggunakan kuesioner dirancang untuk mengukur perubahan perspektif reflektif sebagai indikator awal transformasi. Model ini konsisten dengan pendekatan penilaian pembelajaran transformatif yang menekankan dialog, refleksi kritis, dan rekonstruksi makna. Melalui proses ini, peserta memperluas kapasitas refleksi profesional, memperdalam kesadaran diri, dan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi situasi kritis. Kuesioner menggunakan skala Likert empat poin (1–4) untuk menilai persepsi peserta. Data dianalisis secara deskriptif melalui perbandingan persentase hasil penilaian sebelum dan sesudah.

Persentase yang ditampilkan dalam Tabel 2–4 merupakan hasil konversi dari skor rata-rata responden pada setiap indikator. Skor diperoleh dari penilaian skala Likert empat poin (1 = sangat tidak setuju hingga 4 = sangat setuju), kemudian dihitung nilai rata-rata per item. Nilai tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk persentase menggunakan rumus: $(\text{skor rata-rata}/4) \times 100\%$. Dengan demikian, angka persentase merepresentasikan tingkat kecenderungan persepsi responden terhadap setiap indikator, bukan proporsi jumlah responden secara langsung. Untuk meningkatkan transparansi analisis, nilai rata-rata (mean) juga disajikan berdampingan dengan persentase pada tabel hasil.

Indikator yang diukur mencakup tiga dimensi utama:

2.3.1 Kesadaran Sosial-Ekologis

Indikator ini menilai pemahaman peserta hubungan antara krisis lingkungan, perubahan mata pencaharian, dan dinamika sosial komunitas. Studi tentang lanskap terpadu menegaskan kesadaran ekologis (*ecological awareness*) sebagai prasyarat mobilisasi kolektif, terutama melalui pelibatan multipihak,[15] musyawarah fungsional, integrasi pengetahuan beragam, serta

logika perubahan yang transparan dan adaptif. [16] Dalam konteks wilayah ekstraktif, kesadaran ini berperan sebagai fondasi bagi strategy adaptif berbasis komunitas yang berkelanjutan.

2.3.2 Pemahaman Peran Gereja dalam Pemberdayaan

Dimensi ini mengevaluasi pergeseran pemahaman dari gereja sebagai komunitas ritual menjadi agen transformasi sosial. Penelitian bidang agama dan kehidupan publik yang dilakukan Emma Tomalin et.al menegaskan bahwa agama merupakan bagian dari faktor strategis dalam pembangunan global, dengan pengakuan yang semakin meningkat terhadap peran aktor-aktor keagamaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan makin diakui.[17] Lebih lanjut, bahkan studi agama dan pembangunan semakin efektif, memperkaya analisis serta praktik pembangunan global.[18] Efektivitas tersebut didukung oleh motivasi, kolaborasi, dan inovasi manajerial. Oleh karena itu, transformasi persepsi eklesiologis menjadi indikator utama keberhasilan intervensi partisipatif.

2.3.3 Komitmen Tindakan Kolektif

Dimensi ini menilai kesiapan peserta untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif pembentukan kelompok kerja dan forum dialog. Diskursus modal sosial menunjukkan bahwa komitmen untuk bertindak lebih bersifat prediktif dibandingkan dengan sekadar perubahan sikap. Studi motivasi kolektif dan tindakan kolektif menegaskan kombinasi motif otonom dan internalisasi nilai memperkuat keterlibatan berkelanjutan.[19] Oleh karena itu, pembentukan struktur aksi kolektif menjadi indikator utama keberlanjutan dan transformasi komunitas.

Tabel 1. Kerangka Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Jemaat Partisipatif

Tahapan Evaluasi	Komponen yang Diukur	Instrumen	Indikator Keberhasilan	Keterangan Dampak
Baseline (Pre-Assessment)	Persepsi awal tentang dampak sosial-ekologis dan peran gereja	Kuesioner tertutup & terbuka	Data persepsi awal peserta	Menjadi pembanding perubahan
Implementasi Program	Proses penyadaran, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan	Dokumentasi kegiatan observasi partisipatif	Tingkat partisipasi & keterlibatan peserta	Mengukur kualitas proses intervensi
Post-Assessment	Perubahan kesadaran dan komitmen tindakan	Kuesioner pascakegiatan	Peningkatan persentase pemahaman & kesediaan aksi	Mengukur perubahan sikap dan paradigma
Output (Luaran Langsung)	Struktur aksi kolektif	Notulensi dokumen rencana aksi	Terbentuknya kelompok kerja dan forum dialog	Indikator keberlanjutan awal

Seperti yang ditunjukkan dalam **Tabel 1**, evaluasi pada hasil jangka pendek yang dapat diukur selama pelaksanaan program. Evaluasi tidak hanya menitikberatkan pada perubahan persepsi (*pre-post*), tetapi juga menilai pembentukan struktur aksi kolektif sebagai indikator keberlanjutan program. Model ini mengadopsi kerangka *logic model evaluation* yang umum digunakan dalam evaluasi program pengembangan komunitas dan *faith-based development*. Oleh

karena itu, keberhasilan program diukur secara bertahap: dari perubahan kognitif, pembentukan struktur sosial, hingga potensi transformasi komunitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Transformasi Kesadaran Sosial-Ekologis Jemaat

Hasil *pre-post assessment* memperlihatkan peningkatan mendasar dalam kesadaran sosial-ekologis peserta. Pada tahap *baseline*, hanya sejumlah kecil peserta yang dapat menghubungkan krisis air bersih, degradasi pesisir, dan pergeseran mata pencaharian sebagai satu kesatuan masalah struktural. Mayoritas masih memandang dampak industri secara fragmentaris, terutama dari sisi perspektif ekonomi.

Setelah serangkaian FGD, lokakarya, dan dialog partisipatif, mayoritas peserta menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara krisis ekologis, ketahanan keluarga, dan dinamika jemaat. Diskusi kelompok mengindikasikan bahwa peserta mulai melihat masalah air bersih dan konflik mata pencaharian sebagai isu bersama, bukan persoalan individu. Perubahan ini penting karena kesadaran kolektif menjadi fondasi mobilisasi sosial. Dalam konteks wilayah ekstraktif, peningkatan kesadaran ekologis merupakan syarat untuk pengembangan strategi adaptif berbasis komunitas.

Tabel 2. Transformasi Kesadaran Sosial-Ekologis Jemaat (*Pre-Post Assessment*)

Aspek yang Diukur	Sebelum Program (%)	Sesudah Program (%)	Perubahan (%)
Memahami keterkaitan krisis air, pesisir, dan mata pencaharian sebagai persoalan struktural	34	81	+47
Melihat dampak industri secara komprehensif (ekologis–ekonomi–sosial)	38	84	+46
Menganggap isu lingkungan sebagai tanggung jawab kolektif jemaat	41	88	+47
Mengaitkan krisis ekologis dengan kehidupan iman dan gereja	29	76	+47

Seperti yang ditunjukkan dalam **Tabel 2**, terjadi peningkatan pada seluruh indikator kesadaran sosial-ekologis. Sebelum program, sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai dampak industri dan lebih menekankan aspek ekonomi. Setelah serangkaian FGD dan refleksi partisipatif, mayoritas peserta mampu mengidentifikasi keterkaitan antara krisis ekologis, ketahanan keluarga, dan dinamika jemaat sebagai isu struktural. Peningkatan rata-rata sebesar ± 46 –47 poin persentase menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif dalam membangun kesadaran kolektif. Perubahan ini menjadi dasar bagi mobilisasi sosial, karena kesadaran ekologis berfungsi sebagai prasyarat terbentuknya strategi adaptif berbasis komunitas di daerah ekonomi ekstraktif.



Gambar 1. Proses Focus Group Discussion (FGD) dan pemetaan isu sosial-ekologis oleh peserta jemaat.

3.2 Perubahan Paradigma Peran Gereja

Dimensi kedua yang mengalami perubahan adalah pemahaman mengenai peran gereja. Beberapa peserta memiliki pemahaman fundamental yang menganggap gereja terutama sebagai ruang ibadah dan pelayanan spiritual. Fungsi sosial-ekonomi gereja belum dipahami sebagai mandat bersama. Setelah proses pendidikan berkelanjutan dan refleksi eklesiologis kontekstual, pemahaman peserta tentang peran gereja mulai mengalami pembaruan signifikan. Peserta mulai memahami gereja sebagai komunitas partisipatif yang memiliki panggilan sosial terhadap persoalan lingkungan dan ekonomi jemaat. Diskusi menunjukkan bahwa konsep gereja sebagai komunitas solidaritas lebih mudah diterima ketika dihubungkan dengan pengalaman konkret jemaat. Perubahan ini mengindikasikan bahwa refleksi teologis kontekstual efektif sebagai mekanisme *transformative learning* dalam membongkar ulang realitas sosial.

Tabel 3. Perubahan Persepsi Peran Gereja (Pre–Post Assessment)

Indikator Persepsi	Sebelum Program (%)	Sesudah Program (%)	Perubahan (%)
Gereja terutama sebagai ruang ibadah dan pelayanan rohani	58	22	-36
Gereja memiliki tanggung jawab sosial-ekonomi	21	84	+63
Gereja berperan dalam advokasi dan solidaritas lingkungan	26	79	+53
Gereja sebagai ruang dialog dan mediasi konflik	33	87	+54

Seperti yang ditunjukkan dalam **Tabel 3**, terdapat penurunan signifikan pada persepsi gereja sebagai institusi yang hanya bersifat ritualistik (dari 58% menjadi 22%). Sebaliknya, persepsi gereja sebagai agen pemberdayaan sosial meningkat tajam hingga 84%. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa model reflektif-partisipatif berhasil membongkar ulang fungsi gereja dalam konteks ekonomi ekstraktif. Peserta mulai melihat gereja sebagai ruang solidaritas, mediasi, dan penguatan kapasitas komunitas.

Dalam konteks wilayah yang terpolarisasi akibat perbedaan kepentingan ekonomi, perubahan ini menjadi krusial karena gereja berfungsi sebagai *ruang aman* yang dapat menjembatani kelompok yang terpengaruh secara berbeda oleh industry tambang. Secara teoretis, perubahan ini memperlihatkan transformasi eklesiologis dari model institusional menuju model relasional-komunal, di mana gereja dipahami sebagai komunitas yang terlibat aktif dalam dinamika sosial-ekonomi anggotanya.



Gambar 2. Sesi refleksi eklesiologis kontekstual mengenai peran gereja dalam wilayah ekonomi ekstraktif.

3.3 Penguatan Komitmen Tindakan Kolektif

Dimensi ketiga yang diukur dalam evaluasi program adalah komitmen tindakan kolektif. Apabila perubahan kesadaran dan paradigma tetap tingkat kognitif, maka komitmen tindakan mencerminkan pergeseran menuju tingkat praksis dan institusional. Dalam konteks pemberdayaan komunitas, indikator ini krusial karena keberlanjutan program sangat bergantung pada kesiapan anggota untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif.

Pada tahap awal (*baseline*), sejumlah peserta menunjukkan sikap apatis terhadap isu sosial-ekologis dan cenderung mengalihkan penyelesaian masalah kepada pihak eksternal, termasuk pemerintah atau perusahaan. Namun setelah serangkaian dialog partisipatif, pelatihan kapasitas, dan mediasi komunitas, terdapat peningkatan signifikan dalam kesediaan untuk berpartisipasi secara aktif.

Tabel 4. Perubahan Komitmen Tindakan Kolektif (Pre–Post Assessment)

Indikator Komitmen	Sebelum Program (%)	Sesudah Program (%)	Perubahan (%)
Bersedia terlibat dalam kelompok kerja pemberdayaan	37	92	+55
Mendukung pertemuan rutin pendidikan ekonomi keluarga	44	87	+43
Bersedia mengikuti forum dialog internal jemaat	52	89	+37
Siap berkontribusi dalam aksi kolektif lingkungan	29	81	+52

Seperti yang ditunjukkan dalam **Tabel 4**, terdapat peningkatan komitmen kolektif pada semua indikator. Partisipasi dalam kelompok kerja pemberdayaan meningkat dari 37% menjadi 92%, mencerminkan peningkatan sebesar 55 poin persentase. Hal ini menandakan bahwa intervensi tidak berhenti pada perubahan wacana, tetapi menghasilkan kesiapan struktural untuk bertindak.

Komitmen terhadap forum dialog internal juga mengalami peningkatan, yang mencerminkan berkurangnya ketegangan dan meningkatnya kepercayaan antar kelompok dalam jemaat. Dari sudut pandang modal sosial, pembentukan kelompok kerja dan forum rutin mencerminkan penguatan modal bonding yang menjadi dasar kohesi sosial.

Selanjutnya, kesiapan untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif lingkungan menunjukkan bahwa kesadaran ekologis telah terinternalisasi menjadi orientasi tindakan. Dalam konteks ekonomi ekstraktif, komitmen terhadap tindakan kolektif berfungsi sebagai indikator utama keberlanjutan dan transformasi komunitas berbasis gereja.



Gambar 3. Kelompok Pemberdayaan Gereja Lingkar Tambang

Lokasi: Jemaat GMIH Lokulamo, Weda Utara

3.4 Implementasi Model Empat Tahap

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dirumuskan sebuah model operasional pemberdayaan jemaat partisipatif yang terdiri dari empat tahap yang bersifat siklik dan berkelanjutan. Model ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan tidak dimulai dari intervensi eksternal, melainkan dari kesadaran internal komunitas yang dibangun melalui proses partisipatif.

Langkah pertama adalah Identifikasi Sosial-Ekologis, di mana jemaat secara partisipatif memetakan isu-isu yang dihadapi, seperti krisis air bersih, pergeseran mata pencaharian, dan polarisasi sosial. Pada tahap ini, peserta mulai melihat hubungan antar-isu sebagai masalah struktural, bukan sebatas masalah individu.

Langkah kedua adalah refleksi teologis kontekstual, yaitu proses penafsiran realitas sosial dalam terang iman. Melalui dialog reflektif, terjadi pergeseran paradigma dari gereja sebagai ruang ritual menjadi gereja sebagai komunitas solidaritas dan pemberdayaan.

Langkah ketiga adalah penguatan kapasitas, yang diimplementasikan melalui pelatihan literasi keuangan, perencanaan usaha kecil, dan pemetaan potensi lokal. Pada fase ini, jemaat memperoleh keterampilan praktis untuk merespons dinamika ekonomi ekstraktif secara adaptif. Langkah keempat adalah Aksi Kolektif, yang ditandai dengan pembentukan kelompok kerja pemberdayaan jemaat dan forum dialog internal. Struktur ini memastikan keberlanjutan program dan memperkuat kohesi sosial komunitas.

Keempat tahap tersebut bersifat siklik, bukan linear. Aksi kolektif yang dilaksanakan akan menghasilkan pengalaman baru yang kembali direfleksikan dan diidentifikasi sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan ini menegaskan bahwa pemberdayaan jemaat adalah proses transformasi komunitas yang bersifat adaptif sekaligus partisipatif.



Gambar 4. Model Siklus Pemberdayaan Jemaat Partisipatif di Wilayah Lingkut Tambang
(hasil olahan penulis berdasarkan temuan lapangan, 2025)

Model ini menggambarkan proses pemberdayaan jemaat yang bersifat siklik dan partisipatif. Proses dimulai dengan identifikasi sosial-ekologis, diikuti oleh refleksi teologis kontekstual, penguatan kapasitas, dan tindakan kolektif. Peristiwa yang terjadi menciptakan dinamika baru yang kemudian dipetakan dalam tahap identifikasi berikutnya. Oleh karena itu, pemberdayaan jemaat dipahami sebagai proses berkelanjutan yang didasarkan pada kesadaran dan partisipasi internal komunitas.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di Jemaat GMIH Lokulamo, Weda Utara, artikel ini mengusulkan *Participatory Ecclesial Resilience Model* (PERM) sebagai model awal berbasis kasus dalam pemberdayaan jemaat di wilayah lingkut tambang. Model ini mengintegrasikan empat unsur utama, yaitu kesadaran sosial-ekologis, refleksi teologis kontekstual, penguatan kapasitas adaptif, dan aksi kolektif jemaat. Karena model ini dikembangkan dari satu lokasi kegiatan dengan evaluasi jangka pendek berbasis persepsi peserta, PERM belum dimaksudkan

sebagai model final yang dapat digeneralisasi secara luas. Sebaliknya, model ini perlu dipahami sebagai usulan konseptual awal yang masih membutuhkan pengujian lebih lanjut melalui penerapan pada konteks jemaat lain, jumlah peserta yang lebih luas, serta evaluasi longitudinal.

3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Perspektif Eklesiologi

Analisis faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini dapat dipahami tidak hanya melalui kerangka sosial, tetapi terutama melalui perspektif eklesiologi kontekstual. Dalam eklesiologi partisipatif, gereja dipahami sebagai *koinonia*, yaitu persekutuan yang ada dalam relasi dialogis, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Gereja, oleh karena itu, merupakan komunitas iman yang diharapkan untuk menganalisis realitas sosial melalui perspektif eklesiologis dan mewujudkannya dalam tindakan nyata. Defenisi ini tercermin dalam dinamika komunitas gereja di sekitar wilayah pertambangan, di mana potensi transformasional gereja muncul ketika refleksi iman terhubung secara langsung dengan isu sosial-ekologis yang dihadapi oleh anggota komunitas.

Kepemimpinan dalam jemaat yang terbuka terhadap dialog menjadi faktor pendorong utama sebab menggambarkan praksis *koinonia deliberatif*, yakni gereja sebagai ruang musyawarah iman. Ketika gereja menciptakan ruang aman untuk berdialog, mendengarkan, dan berpendapat berbeda, persekutuan melampaui simbol liturgis dan terwujud sebagai hubungan nyata yang memperkuat iman. Partisipasi aktif berbagai elemen jemaat, termasuk generasi muda, menunjukkan dinamika ekklesia sebagai tubuh yang hidup dan bersifat intergenerasi. Partisipasi ini memperkuat dimensi komunal gereja serta mendorong terbentuknya solidaritas yang lebih luas.

Urgensi masalah sosial-ekologis, seperti krisis air bersih dan ketidakpastian mata pencaharian, semakin menegaskan dimensi diakonia gereja. Tekanan realitas sehari-hari mendorong jemaat memaknai panggilan iman adalah bagian dari tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, gereja menuju praktik solidaritas yang nyata. Diakonia kini dipahami tidak hanya sebagai bantuan karitatif, tetapi juga sebagai partisipasi aktif dalam memperjuangkan keberlanjutan kehidupan komunitas.

Namun, dinamika ekonomi ekstraktif juga menimbulkan tantangan signifikan bagi kesatuan tubuh Kristus. Polarisasi internal akibat ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan menunjukkan potensi fragmentasi relasional dalam komunitas. Ketika sebagian anggota memperoleh keuntungan ekonomi sementara yang lain menderita kerugian ekologis, ketegangan etis dan sosial menjadi tak terelakkan. Situasi ini menempatkan gereja dalam dilema antara mempertahankan kesatuan dan merespons keadilan sosial.

Selain itu, modifikasi struktur kerja seperti sistem shift yang bertepatan dengan waktu ibadah, serta sensitivitas isu pertambangan memengaruhi ritme persekutuan. Mobilitas sosial dan tekanan ekonomi kontemporer berdampak pada penurunan intensitas partisipasi gerejawi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika ekonomi kontemporer dapat mengganggu kontinuitas praksis *koinonia* jika tidak dikelola secara efektif.

3.6 Keterbatasan Program

Program pengabdian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar interpretasi hasil tetap proporsional. *Pertama*, jumlah peserta yang terlibat relatif terbatas, yaitu 38 orang, dan berasal dari satu lokasi jemaat, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasi secara luas ke seluruh jemaat di wilayah lingkaran tambang Halmahera. *Kedua*, durasi intervensi berlangsung dalam jangka pendek sehingga evaluasi yang dilakukan baru mampu menangkap perubahan awal pada tingkat persepsi, pemahaman, dan komitmen peserta, belum sampai pada perubahan perilaku atau dampak sosial-ekonomi yang lebih permanen. *Ketiga*, data

evaluasi yang digunakan dalam artikel ini berbasis pada kuesioner persepsi pre-post dan dianalisis secara deskriptif. Oleh karena itu, hasil yang ditampilkan perlu dipahami sebagai indikasi perubahan kecenderungan persepsi peserta, bukan sebagai bukti hubungan kausal atau signifikansi statistik. *Keempat*, program ini belum dilengkapi dengan evaluasi tindak lanjut jangka menengah atau longitudinal untuk menilai keberlanjutan kelompok kerja, forum dialog, serta implementasi rencana aksi jemaat setelah kegiatan berakhir. Dengan demikian, model yang diusulkan dalam artikel ini perlu diposisikan sebagai model awal berbasis kasus yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada konteks jemaat lain, jumlah peserta yang lebih luas, dan periode evaluasi yang lebih panjang.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan kecenderungan persepsi peserta pada tiga aspek utama, yaitu kesadaran sosial-ekologis, pemahaman mengenai peran gereja dalam pemberdayaan, dan komitmen terhadap tindakan kolektif. Berdasarkan evaluasi deskriptif pre-post, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara krisis ekologis, perubahan mata pencaharian, dan kehidupan bergereja. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan luaran langsung berupa pembentukan kelompok kerja pemberdayaan dan forum dialog internal jemaat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan partisipatif-kontekstual berpotensi menjadi strategi awal dalam pemberdayaan jemaat di wilayah lingkut tambang. Namun, karena kegiatan ini dilaksanakan pada satu lokasi, melibatkan jumlah peserta terbatas, dan menggunakan evaluasi jangka pendek berbasis persepsi, model yang diusulkan perlu dipahami sebagai model awal berbasis kasus, bukan sebagai model final yang telah tervalidasi secara luas. Pengujian lebih lanjut melalui penerapan pada konteks jemaat lain dan evaluasi jangka menengah diperlukan untuk menilai keberlanjutan dan replikabilitasnya.

Pendanaan

Pendanaan kegiatan ini bersumber dari Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dalam kemitraan dengan *Evangelical Mission in Solidarity* (EMS)

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penyusunan dan publikasi artikel ini.

Daftar Pustaka

- [1] BPS Maluku Utara, "Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Triwulan IV-2023," Oct. 2024, Accessed: Feb. 19, 2026.
- [2] BPS Maluku Utara, "Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Triwulan III-2025," Nov. 2025.
- [3] BPS Maluku Utara, "Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Maluku Utara September 2024," Jan. 2025, Accessed: Feb. 19, 2026. [Online]. Available: https://malut.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/769/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-296-.html?utm_source=chatgpt.com
- [4] JATAM, "Catatan Akhir Tahun-Maluku Utara 2025 Neraka di Zona Pengorbanan: Pertumbuhan Ekonomi Merobek Keadilan," Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Maluku Utara, Ternate, Jan. 2026. Accessed: Feb. 19, 2026. [Online]. Available: https://jatam.org/id/lengkap/Malut-Neraka-Zona-Pengorbanan?utm_source=chatgpt.com
- [5] Priyaji Agung Pambudi, "The Paradox of Nickel Investment in Indonesia," *Environ. Pollut. J.*, vol. 5, pp. 299–319, Nov. 2025.

- [6] F. Berkes and H. Ross, "Community Resilience: Toward an Integrated Approach," *Soc. Nat. Resour.*, vol. 26, no. 1, pp. 5–20, Jan. 2013, doi: <https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605>
- [7] G. Wilson, "Multifunctional 'quality' and rural community resilience: Multifunctional 'quality' and rural community resilience," *Trans. Inst. Br. Geogr.*, vol. 35, no. 3, pp. 364–381, Apr. 2010, doi: <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2010.00391.x>
- [8] Neya Global and A. N. Kazanskaia, "Stakeholder Engagement and Collaboration in Participatory Development," *NEYA Glob. J. Non-Profit Stud.*, 2025, doi: 10.64357/neya-gjnps-prtdvchange-05.
- [9] K. Krumbiegel, M. Maertens, and M. Wollni, "The Role of Fairtrade Certification for Wages and Job Satisfaction of Plantation Workers," *World Dev.*, vol. 102, pp. 195–212, Feb. 2018, doi: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.09.020>
- [10] S. Ranta-Tyrkkö and K. Närhi, "Striving to strengthen the ecosocial framework in social work in Finland," *Community Dev. J.*, vol. 56, no. 4, pp. 608–625, Oct. 2021, doi: <https://doi.org/10.1093/cdj/bsab030>
- [11] Sirayandris J. Botara, "PENDETA PERLU BERTOBAT": Komitmen Panggilan Pelayanan Sebagai Proses Pembaharuan Hidup Pendeta Desa Melalui Program Pendidikan Berkelanjutan," in *Pastor Duan, pastor Desa : buku penghormatan 40 tahun kependetaan Pdt.(Em). Leonard P. Duan*, S. H. Sirayandris J. Botara; Imelda Kahiking, Ed., Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- [12] S. Deneulin and C. Montevecchio, "The Catholic Church and Mining: Types of Responses." Jul. 03, 2025. doi: <https://doi.org/10.20944/preprints202507.0239.v1>
- [13] M. Barceló, A. Woodhead, and S. Gelcich, "Exploring adaptive capacity at the land-sea interface: insights from coastal rural communities in Chile," *Ecol. Soc.*, vol. 30, no. 2, p. art4, 2025, doi: <https://doi.org/10.5751/ES-15893-300204>
- [14] V. Anselmann, "How to promote preservice teachers' reflections through critical incident training," *Front. Educ.*, vol. 8, Jul. 2023, doi: <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1212158>
- [15] C. A. Anandi, M. Ros-Tonen, J. Reed, and T. Sunderland, "Indicators to assess viable entry points for implementing landscape approaches," *Ecol. Soc.*, vol. 30, no. 4, p. art37, 2025, doi: <https://doi.org/10.5751/ES-16490-300437>
- [16] L. J. Sonter, D. Herrera, D. J. Barrett, G. L. Galford, C. J. Moran, and B. S. Soares-Filho, "Mining drives extensive deforestation in the Brazilian Amazon," *Nat. Commun.*, vol. 8, no. 1, p. 1013, Oct. 2017, doi: <https://doi.org/10.1038/s41467-017-00557-w>
- [17] E. Tomalin, J. Haustein, and S. Kidy, "Religion and the Sustainable Development Goals," *Rev. Faith Int. Aff.*, vol. 17, no. 2, pp. 102–118, Apr. 2019, doi: <https://doi.org/10.1080/15570274.2019.1608664>
- [18] B. Bompani, "Religion and development: Tracing the trajectories of an evolving sub-discipline," *Prog. Dev. Stud.*, vol. 19, no. 3, pp. 171–185, Jul. 2019, doi: <https://doi.org/10.1177/1464993419829598>
- [19] L. Yip et al., "Motivations to engage in collective action: A latent profile analysis of refugee supporters," *Br. J. Soc. Psychol.*, vol. 64, no. 1, Jan. 2025, doi: <https://doi.org/10.1111/bjso.12786>